



LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan Telp. 0735-482353 Kode Pos 32181
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 40 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu pembentukan Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP yang diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pemebeentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana tercantum pada diktum KESATU bertugas menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA BPKAD KAB. OKU TIMUR, 1



AGUSTIAN PAHRIMALE, SH.,MH
PEMUDA
NIP. 19750815 199903 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kab. OKU Timur
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah (LkjIP) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	: Kepala BPKAD Kab. OKU Timur
2.	Ketua	: Sekretaris BPKAD Kab. Oku Timur
3.	Anggota	: 1. Kabid Anggaran BPKAD Kab. OKU Timur 2. Kabid Akuntansi BPKAD Kab. OKU Timur 3. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. OKU Timur 4. Kabid Aset BPKAD Kab. OKU Timur 5. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPKAD Kab. OKU Timur 6. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan 7. Staf Sekretariat BPKAD Kab. OKU Timur

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA BPKAD KAB. OKU TIMUR,



AGUSTIAN PAHRIMALE, SH.,MH
PEMBINA FINANSIA MUDA
NIP. 19730815 199903 1 008

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Nomor SOP	: 900/ /BPKAD/1.1/2023
	Tgl Pembuatan	: Desember 2022
	Tgl Revisi	:
	Tgl Efektif	: Januari 2023
	Disahkan Oleh	Kepala BPKAD Kabupaten OKU Timur,  BPKAD Agustian Pahrin, S.H., M.H. NIP. 19730815-199903 1 008
	Nama SOP	: Penyusunan LKjIP
DASAR HUKUM 1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki kemampuan tentang cara penyusunan LKjIP 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana	
KETERKAITAN ✓ Sub Bagian Keuangan, dan ✓ Bidang-Bidang	PERALATAN/PERLENGKAPAN ✓ Komputer yang dilengkapi program microsoft office ✓ DPA BPKAD Kabupaten OKU Timur TA. 2022 ✓ Perjanjian Kinerja Kabupaten OKU Timur Tahun 2022 ✓ Laporan Triwulan Tahun 2022	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila dokumen pendukung kurang lengkap maka laporan tidak sesuai dengan ketentuan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Kaban	Sekretaris	Kasubbag PEP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag. PEP untuk menyusun draf LKjIP						1 Hari	Disposisi	Disposisi Sekretaris
2	Membuat format untuk di isi oleh Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan LKjIP dan menugaskan staf menyampaikan kepada Sekretariat dan Bidang-bidang					Disposisi	2 Hari	Format isian	Sesuai Format, Sistematika berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
3	Menyampaikan format LKjIP yang sudah di isi oleh Sekretariat dan Bidang kepada Kasubbag. PEP					Format isian LKjIP	5 Hari	Data LKjIP	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Laporan Realisasi Triwulan

4	Mengolah data dan informasi yang diterima dari Sekretariat dan Bidang-bidang kemudian menyusun draf LKjIP, dan meneruskannya ke Sekretaris					Data	5 Hari	Draf LKjIP	Konsultasi dengan Kaban dan Sekretaris
5	Meneliti draf LKjIP dan diteruskan ke Kaban		T			Draf LKjIP	1 Hari	Draf LKjIP	Sudah diparaf Kasubbag PEP, Sekretaris
6	Menandatangani LKjIP	T				Draft LKjIP	1 Hari	LKjIP	Tanda Tangan LkjIP oleh Kaban
7	Dok. LKjIP yang sudah diTandatangani Disampaikan ke Sekretariat Daerah melalui Bag. Organisasi dan di diarsipkan					Dokumen LKjIP BPKAD Kab. OKU Timur	1 Hari	Dokumen LKjIP BPKAD Kab. OKU Timur	Dokumen LKjIP BPKAD Kab. OKU Timur

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini juga merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik serta sebagai alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi (bidang) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Secara garis besar, laporan kinerja ini memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasar Indikator Kinerja dan Sasaran Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur tahun berikutnya.

Martapura, 14 Januari 2025

KEPALA BPKAD KAB. OKU TIMUR,

AGUSTIAN PAHMAMALE, S.H.,M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19730815 199903 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi Perencanaan Pengendalian Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Melakukan Pembinaan Teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Melaksanakan urusan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra BPKAD adalah :

1. Tujuan :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Sasaran :

- a. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih dan melayani
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2024 ini lebih menekankan pada Outcome dan Output. Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 (tiga) Program, 14 Kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian realisasi kinerja dari indikator kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan persentase rata-rata realisasinya mencapai 98,58 % serta efektifitas capaian realisasi anggaran sebesar 99,32%. Terkait pencapaian target realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 tersebut pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil dan memenuhi target yang ditetapkan. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	3
1.3 ASPEK STRATEGIS	11
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	13
1.5 SISTIMATIKA PENULISAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026	14
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	21
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	21
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja/Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2024	34
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Tertuang Dalam Renstra BPKAD	48
3.1.4 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024	49
3.1.5 Aspek Penggunaan Sumber Daya	50
3.1.6 Analisis Program Pencapaian Kinerja	52
3.2 REALISASI ANGGARAN	52
BAB IV PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1	Data Pegawai BPKAD Kab. OKU Timur Berdasar Jenjang Jabatan	11
Tabel 1.3.2	Data Pegawai BPKAD Kab. OKU Timur Menurut Golongan	11
Tabel 1.3.3	Data Sumber Dana BPKAD Kab. OKU Timur TA 2024	12
Tabel 2.2.1	Penetapan Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kab. OKU Timur	20
Tabel 3.1.1.1	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 3.1.2.1	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja BPKAD Kab. OKU Timur TA 2021 dan TA 2024	35
Tabel 3.1.3.1	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah Renstra BPKAD Tahun 2021-2026	48
Tabel 3.1.4.1	Capaian Indikator Kinerja Program BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024	49
Tabel 3.1.4.2	Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024	50
Tabel 3.1.5.1	Uraian Aspek Keuangan BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024	51
Tabel 3.1.5.2	Uraian Aspek Aset BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024	51
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKAD Kab. OKU Timur	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut akan timbul hak dan kewajiban daerah yang terukur dengan kinerja dan pendanaan yang dikelola melalui suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan, tertib, tepat waktu, akurat, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbandingan seimbang antara keluaran dan hasil merupakan buah kinerja yang efektif dan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau inputan terendah adalah efisiensi dari kinerja yang efektif.

Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab setiap Instansi Pemerintah

atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban pemerintah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP diantaranya berfungsi sebagai :

- a. Instrumen penting (vital) untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- b. Sarana dan cara yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat azas (Konsisten).
- c. Sarana dan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
- d. Instrumen untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/OPD dalam menjalankan misi, tugas/jabatan sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/OPD.
- e. Sarana dan cara untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Demikian pula dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur sebagai instansi pemerintah/OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, memiliki kewajiban yang sama yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai ukuran pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan untuk dilaksanakan atas penggunaan anggaran yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat perencanaan kinerja yang merujuk pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2021-2026,

capaian kinerja selama pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertindak sebagai PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan melakukan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi BUD, meliputi :
 1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 3. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
 6. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Penyimpanan uang daerah;
 8. Penetapan SPD;
 9. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;

10. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 11. Penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
 12. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 13. Pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
 14. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 15. Penyajian informasi keuangan daerah;
 16. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 17. Penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
 - f. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :
 1. Pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 2. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 3. Pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 4. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 5. Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - g. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
 - j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
 - k. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
 - l. Pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
 - m. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan BPKAD;
- r. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala badan dibantu oleh :

- 1. Sekretaris Badan
- 2. Kepala Bidang Anggaran
- 3. Kepala Bidang Perbendaharaan
- 4. Kepala Bidang Akuntansi
- 5. Kepala Bidang Aset

1. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja badan yang meliputi pengelolaan keuangan, penataan peraturan keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, protokoler, pelaksanaan evaluasi dan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. Pengelolaan penyusunan dokumen program dan perencanaan;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan kearsipan, dan kepastakaan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- j. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris badan dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

2. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam bidang pengelolaan anggaran, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala bidang berfungsi sbb :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. Pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD);
- f. Pelaksanaan pemrosesan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD);
- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- j. Pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD;
- k. Penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;

- l. Penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
- m. Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- n. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi ;
 1. Penyiapan anggaran kas;
 2. Penyiapan SPD;
- o. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;
- p. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- q. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

3. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam bidang perbendaharaan dan verifikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perbendaharaan dan pengelolaan kas;
- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas;
- d. Pemrosesan penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- e. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban APBD;

- g. Pengendalian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);
- i. Pelaksanaan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
- j. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- l. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
- m. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman daerah;
- o. Penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
- q. Pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penerbitan SP2D;
- r. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- v. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi di bantu oleh:

- 1. Kepala Sub Bidang Verifikasi
- 2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

4. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam bidang Akuntansi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka akuntansi;

- c. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pengendalian, pemeliharaan dan pemutakhiran data sistem informasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang akuntansi di bantu oleh:

- 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan
- 2. Kepala Sub Bidang Pelaporan

5. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam bidang Penatausahaan Aset dan Pemberdayaan serta Pengamanan Aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis bidang penatausahaan aset daerah;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah;
- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah;
- e. Pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi aset daerah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah;
- g. Pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- h. Penyimpanan benda-benda berharga, kecuali benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut perangkat daerah lain;

- i. Penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh perangkat daerah;
- j. Pengkoordinasian pengumpulan data Inventaris Barang;
- k. Pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang milik daerah;
- l. Penyiapan bahan usulan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- m. Penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah bersama dengan SKPD terkait;
- n. Pelaksanaan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah dari Pengguna Barang;
- o. Penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- p. Penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- q. Penyiapan data koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
- r. Perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
- t. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- u. Pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- v. Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- w. Pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
- x. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- y. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- z. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- aa. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- bb. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang aset di bantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset.
2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengamanan Aset.

1.3. ASPEK STRATEGIS

1. Aspek Strategis Eksternal

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur disamping sebagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

2. Aspek Strategis Internal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 30 Desember 2024 berjumlah 59 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Jenjang Jabatan

Tabel 1.3.1
Data Pegawai BPKAD Kab. OKU Timur Berdasar Jenjang Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Posisi per 29-12-2023	Mutasi Tahun 2023		Posisi per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
1.	Eselon II	1	-	-	1
2.	Eselon III	5	-	-	5
3.	Eselon IV	10	-	-	10
4.	Staf	14	1	2	13
6.	Tenaga Honorer	29	1	-	30
Jumlah		59	2	2	59

Sumber : Dokumen Kepegawaian BPKAD Kab. OKU Timur

b. Menurut golongan

Tabel 1.3.2
Data Pegawai BPKAD Kab. OKU Timur Menurut Golongan

No	Golongan	Posisi per 29-12-2023	Mutasi Tahun 2023		Posisi per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
1.	Golongan IV	6	-	-	6
2.	Golongan III	21	1	-	22
3.	Golongan II	3	-	2	1
4.	Golongan I	-	-	-	-
5.	CPNS	-	-	-	-

No	Golongan	Posisi per 29-12-2023	Mutasi Tahun 2023		Posisi per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
6.	Tenaga Honorer	29	1	-	30
	Jumlah	59	2	2	59

Sumber : Dokumen Kepegawaian BPKAD Kab. OKU Timur

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa ketersediaan bangunan gedung dan peralatan kantor.

3) Sumber Dana

Dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 394.712.892.031,00 dengan realisasi sebesar Rp. 392.020.927.424,00 yang berasal dari APBD Kabupaten OKU Timur dengan rincian:

Tabel 1.3.3
Data Sumber Dana BPKAD Kab. OKU Timur Tahun Anggaran 2024

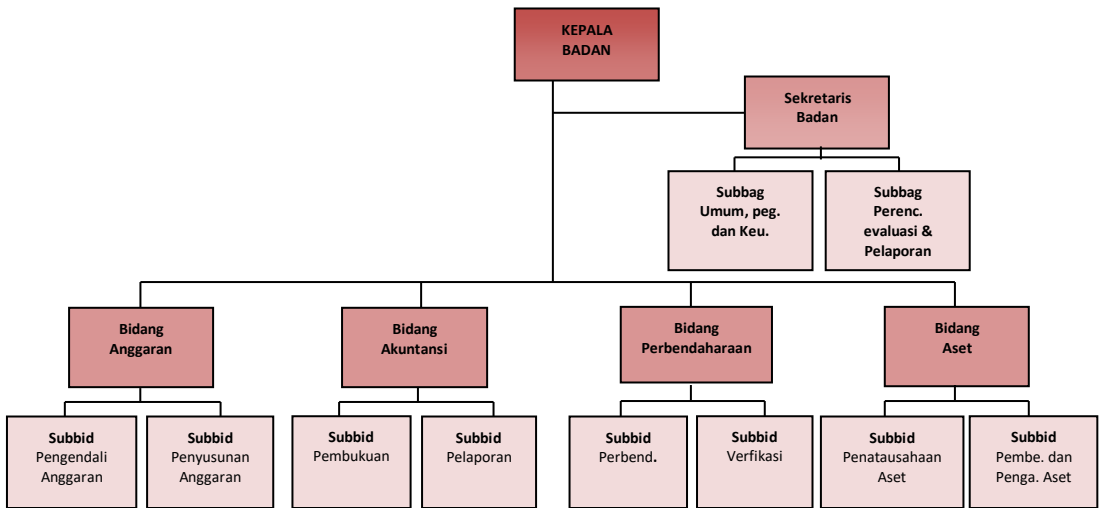
No	Uraian		Pagu	Realisasi
I	Belanja Operasi		14.455.857.831,00	13.483.667.849,00
	-	Belanja Pegawai	5.227.612.656,00	4.972.640.303,00
	-	Belanja Barang dan Jasa	8.028.245.175,00	7.311.027.546,00
	-	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
II	Belanja Modal		316.378.200,00	302.428.292,00
	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.378.200,00	302.428.292,00
	-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
III	Belanja Tidak Terduga		2.000.000.000,00	294.175.283,00
	-	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	294.175.283,00
IV	Belanja Transfer		377.940.656.000,00	377.940.656.000,00
	-	Belanja Bagi Hasil	5.165.944.000,00	5.165.944.000,00
	-	Belanja Bantuan Keuangan	372.774.712.000,00	372.774.712.000,00
	Jumlah		394.712.892.031,00	392.020.927.424,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kab. OKU Timur, per 31 Desember 2024

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi
BPKAD Kab. OKU Timur



Jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur per 31 Desember 2024 berjumlah 59 orang, terdiri dari 29 orang PNS dan 30 orang Tenaga Honorer.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas mengenai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bab II	Perencanaan Kinerja	Menjelaskan muatan Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan
Bab IV	Penutup	Menjelaskan Keseluruhan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan strategi peningkatan kinerja di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2021–2026 telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten OKU Timur Tahun 2021–2026 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2024. Adapun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana agar organisasi tetap eksis, antisipatif dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur disusun guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Visi Pemerintah Kabupaten OKU Timur adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR YANG MAJU LEBIH MULIA”

2.1.2 Misi.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik berdasarkan visi yang telah ditetapkan. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur disusun guna mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten OKU Timur ke-1 (satu) yaitu : **“MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA DAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS DENGAN MENGUTAMAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT”**

2.1.3 Tujuan dan sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berpijak pada misi yang telah dilakukan. Tujuan dari Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik, Bersih dan Melayani
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aset Daerah

2.1.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif. Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan administrasi perkantoran pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi, integritas, kapabilitas aparatur pengelolaan keuangan dan aset melalui pendidikan formal dan informal;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana administrasi perkantoran pengelolaan keuangan dan aset.

2. 1.5 Pencapaian tujuan dan sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
 - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Standar Harga
 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penilaian Barang Milik Daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja OPD tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2024
BPKAD Kab. OKU Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Peningkatan tata kelola keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 9.444.514.631,- Rp. 384.282.199.400,- Rp. 986.178.000,-
JUMLAH				Rp. 394.712.892.031,-

Sumber : Renstra BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026 dan DPA BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/ketidakberhasilan) dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M/PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target dan realisasi tahun 2024, dari penetapan sasaran dan tujuan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Maka target dan realisasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2024 mempunyai 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan, rencana/target dan realisasi capaian kinerja yang dicapai tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani Sasaran : 1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih dan melayani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	95,75%	95,75%
I.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %
2.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
II.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100%	100%	100%
7.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	416 Orang/Bulan	416 Orang/Bulan	100%
8.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100 %
10.		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
11.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%
III.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
12.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
IV.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	66%
13.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14.		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3 Orang	- Orang	0%
V.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%
16.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15 Paket	15 Paket	100%
17.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	100%
18.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	100%
19.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	6 Paket	6 Paket	100%
20.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
21.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
22.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
VI.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	100%	100%
23.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3 Paket	3 Paket	100%
24.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	4 Unit	100%
VII.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100%
25.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
26.		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
27.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
28.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%
VIII.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	100%	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
29.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit	14 Unit	100%
30.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharahan	Unit	6 Unit	6 Unit	100%
31.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	100%
32.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	100%
2.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%
			Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	100%	100%	100%
			Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	100%	100%	100%
IX.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	227	227	100%
33.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
34.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
35.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
36.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
37.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
38.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
39.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
40.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
41.		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
X.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jenis	10	10	100%
42.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
43.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	100%
44.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
45.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	100%
46.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
47.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	96 Laporan	96 Laporan	100%
48.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
49.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
50.		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
51.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	54 Orang	54 Orang	100%
XI.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Dilaksanakan	Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%
52.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%
53.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
54.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
55.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
56.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
57.		Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
58.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
59.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
60.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
61.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	54 Orang	54 Orang	100%
62.		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
63.		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
XII.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Penunjang Urusan yang Dilaksanakan	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%
64.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
65.		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
66.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
67.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
68.		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
XIII.		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%
69.		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	54 Orang	54 Orang	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Y/T	Y	Y	100%
XIV.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100%	100%
70.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
71.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
72.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
73.		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
74.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
75.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
76.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
77.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Tujuan dan Sasaran BPKAD	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
78.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
79.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
80.		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
81.		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
82.		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	108 Orang	108 Orang	100%
TOTAL PERSENTASE CAPAIAN REALISASI KINERJA							98,58%

Catatan :

Total Persentase Capaian Realisasi Kinerja = Jumlah Capaian Realisasi Rata-Rata Program Kegiatan / Jumlah Program Kegiatan

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja/Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 s/d Tahun 2024

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD secara umum memuat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut. Pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut tentu harus mendukung tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan serta merujuk pada visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Strategis OPD dalam kaitan tersebut juga menetapkan tujuan dan sasaran strategis OPD serta indikator kinerja pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat menjadi tolak ukur pada realisasi pelaksanaan kinerja.

Merujuk pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan rencana kerja pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut nantinya akan diukur target dan realisasi kinerjanya sesuai indikator yang ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut sangat penting untuk mengukur perbandingan kinerja selama periode pelaksanaan Rencana Strategis OPD lima tahun berturut-turut. Pengukuran kinerja tersebut tentu akan menjadi faktor pembanding terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun.

Untuk mengukur perbandingan kinerja tersebut, sub bagian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengukur pelaksanaan kinerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Dengan cara membandingkan pencapaian target dan realisasi kinerja pada pelaksanaan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Sehingga dapat ditentukan perbandingan kinerja selama berlangsungnya Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur
Tahun Anggaran 2021 Sampai Tahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Tahun 2024	Tahun 2021			Tahun 2022			Target	2023		Target	2024	
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	4 Dokume n	4 Dokum en	100 %	4 Dokume n	4 Dokum en	100 %	11 Dokum en	11 Dokum en	100 %
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kegiata n Tidak Dilaksan akan	Kegiatan Tidak Dilaksanak an	-	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kegiata n Tidak Dilaksan akan	Kegiatan Tidak Dilaksanak an	-	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kegiata n Tidak Dilaksan akan	Kegiatan Tidak Dilaksanak an	-	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokume n	1 Dokum en	100 %	1 Dokum en	100 %	1 Dokum en
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Caaian Kinerja dan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Lapora n	100%	2 Laporan	2 Lapora n	100%	2 Lapora n	10 0%	2 Lapora n

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	-	-	-	100%	100%	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	100%	100%	100%
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30 Pegawai	30 Pegawai	100 %	416 Orang/Bulan	416 Orang/Bulan	100%	416 Orang/Bulan	416 Orang/Bulan	100%	416 Orang/Bulan	416 Orang/Bulan	100%
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	100 %
10.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
12.	Penyusunan pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan semesteran dan prognosis APBD	Jumlah OPD	53 OPD	53 OPD	100 %	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	-	-	-	100%	100%	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	100%	100%	100%
13.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase				100%	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	100%	66%
14.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
16.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Pegawai	-	0 %	4 Orang	1 Orang	25%	4 Orang	1 Orang	25%	3 Orang	- Orang	0%
17.	Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD	53 OPD	53 OPD	100 %	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase				100%	100%	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	100%	100%	100%
18.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Jenis	20 Jenis	100 %	25 Paket	25 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100%
19.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Unit	41 Unit	41 Unit	100 %	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
20.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	75 Jenis	75 Jenis	100 %	35 Paket	35 Paket	100%	35 Paket	35 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
21.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	70 Jenis	70 Jenis	100 %	83 Paket	83 Paket	100%	83 Paket	83 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
22.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	7 Jenis	7 Jenis	100 %	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%

23.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4 Jenis	4 Jenis	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	850 Dokumen	850 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
24.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Kali Kunjungan	10 Kali Kunjungan	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
25.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25 Pegawai	25 Pegawai	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	-	-	-	100%	100%	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%	100%	100%	100%
26.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%	3 Paket	3 Paket	100%
27.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	14 Unit	14 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	-	-	-	100%	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%	100%
28.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat yang Dikirimkan	Laporan	2800 lembar	700 lembar	25 %	100 Laporan	100 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
29.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
30.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
31.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64 orang	64 orang	100 %	8 Laporan	8 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%

VII I.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	-	-	-	100%	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%	100%
32.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12 Unit	12 Unit	100 %	4 Unit	4 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
33.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Unit	2 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
34.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Gedung	2 Gedung	100 %	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
35.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17 Jenis	17 Jenis	100 %	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Persen	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Deviasi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja dalam APBD	Persen				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IX.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	-	-	-	222	222	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%	227	227	100%
36.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

37.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
38.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
39.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
40.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
41.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
42.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
43.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2 Peraturan	2 Peraturan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
44.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2 Peraturan	2 Peraturan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
X.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jenis	-	-	-	-	-	-	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
45.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

46.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	212 Dokumen	212 Dokumen	100%	212 Dokumen	212 Dokumen	100%	108 Dokumen	108 Dokumen	100%
47.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
48.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	52 Dokumen	52 Dokumen	100%
49.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
50.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%	96 Laporan	96 Laporan	100%

51.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
52.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	636 Dokumen	636 Dokumen	100%	636 Dokumen	636 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
53.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	22 Peraturan	15 Peraturan	68,18 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
54.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	100%	54 Orang	54 Orang	100%
XI.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Dilaksanakan	Jenis				6 Jenis	6 Jenis	100%	13 Jenis	13 Jenis	100%	12 Jenis	12 Jenis	100%
55.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	18 Koordinasi	18 Koordinasi	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%

56.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
57.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
58.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
59.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Peraturan	2 Peraturan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
60.	Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

61.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kegiatan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
62.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
63.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Peraturan	1 Peraturan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
64.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
65.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	53 OPD	53 OPD	100 %	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	100%	54 Orang	54 Orang	100%
66.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
67.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Penunjang Urusan yang Dilaksanakan	Jenis				5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
68.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	Laporan	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%

	Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
69.	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
70.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
71.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Jenis	-	0 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
72.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
XII I.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
73.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Jenis	1 Jenis	100 %	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	100%	54 Orang	54 Orang	100%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Y/T	-	-	-	Y	Y	100%	Y	Y	100%	Y	Y	100%
XI V.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	13 Jenis	13 Jenis	100%	100%	100%	100%	12 Jenis	12 Jenis	100%	100%	100%	100%
74.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
75.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	53 Dokumen	53 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
76.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
77.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	200 Dokumen	200 Dokumen	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
78.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 Laporan	53 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
79.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 Laporan	53 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
80.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5 Koordinasi	5 Koordinasi	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
81.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 Laporan	53 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
82.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%

83.	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	53 Laporan	53 Laporan	100%	53 Laporan	53 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
84.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
85.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	53 Kali Koordinasi	53 Kali Koordinasi	100 %	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	100%	108 Orang	108 Orang	100%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Tertuang Dalam Renstra BPKAD.

Bagian laporan pada sub bagian ini menjelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Target Kinerja Jangka Menengah sesuai dengan Rencana Strategis dimaksud dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.3.1
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024
Terhadap Target Jangka Menengah RENSTRA BPKAD Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				Capaian Tahun 2024	Renstra 2021-2026				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur	Persentase tingkat hasil pelaksanaan kegiatan yang terlaksana dengan baik pada waktu yang ditentukan	100	80	85	90	95	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih dan melayani	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan dan aset	100	80	83	85	92	95
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026

Perbandingan kinerja pada pelaksanaan tahun berjalan yaitu tahun 2024 dalam kaitan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan apakah telah tercapai sesuai target yang ditetapkan pada awal penyusunan dan penetapan Rencana Strategis. Perbandingan tersebut dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan terhadap pencapaian target selanjutnya oleh Pimpinan OPD.

3.1.4 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Kompetensi dan Kapabilitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, bersih dan melayani

Capaian sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program seperti yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur, target dan realisasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.1
Capaian Indikator Kinerja Program
BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Cakupan pelayanan administrasi	%	97	97	100	-
2.	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik	%	97	97	100	-
3.	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	95	95	100	-
4.	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	%	96	96	100	-

Sumber : Renstra BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026

Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terangkum dalam 4 (empat) indikator kinerja program berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pelaksanaan kegiatan terkait keuangan dan aset daerah sesuai indikator kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan capaian kinerja yang baik.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Tabel 3.1.4.2
Indikator Kinerja Utama
BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	100

Sumber : Renstra BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja pada tabel di atas merupakan indikator utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset. Pencapaian predikat nilai WTP pada realisasi tahun 2024 menggambarkan bahwa indikator kinerja telah dilaksanakan dan menunjukkan capaian kinerja yang baik. Pencapaian predikat WTP tersebut tentu dapat terjadi atas dorongan tekad pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyajikan laporan keuangan semaksimal mungkin.

3.1.5 Aspek Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian realisasi kinerja yang baik dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target, serta tercapainya indikator kinerja utama yang ditetapkan berdasar tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari aspek penggunaan sumber daya dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dengan demikian pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberi kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Aspek sumber daya dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut antara lain :

1. Aspek Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun Anggaran 2024 dibiayai dari APBD Kabupaten OKU Timur Tahun 2024. Anggaran dan realisasi keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.5.1
Uraian Aspek Keuangan BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	%
Belanja Operasi	14.455.857.831	13.483.667.849	972.189.982	93,28
Belanja Modal	316.378.200	302.428.292	34.518.500	91,55
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	294.175.283	1.654.998.000	14,71
Belanja Transfer	377.940.656.000	377.940.656.000	0	100,00
Jumlah	394.712.892.031	392.020.927.424	2.691.964.607	99,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024 per 31 Desember 2024

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan anggaran yang ditetapkan telah tercapai dengan tingkat penggunaan sumber dana sebesar 99,32 % yang terserap melalui alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Penyerapan anggaran dana tersebut telah memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tidak melebihi dari pagu yang ditetapkan. Efisiensi penyerapan anggaran tersebut dalam pencapaian target kinerja dapat dikatakan baik.

2. Aspek Aset

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.2
Uraian Aspek Aset BPKAD Kab. OKU Timur Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal (2 Januari 2024)	Saldo Akhir (31 Desember 2024)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	5.360.835.883,00	5.680.264.175,00
3.	Gedung dan Bangunan	2.972.887.389,00	3.132.048.245,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	394.526.392,00	394.526.392,00
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	4.762.849.205,06	4.762.849.205,06
Jumlah		3.965.400.458,94	4.443.989.606,94

Sumber : Data Rekonsiliasi Unaudited BPKAD Kabupaten OKU Timur dengan Bidang Aset

Efisiensi pemanfaatan penggunaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan target kinerja khususnya pada pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan tepat.

Ketersediaan aset sebagai sarana dan prasana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi telah menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini WTP.

3.1.6 Analisis Program Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang diharapkan tidak terlepas dari adanya program yang ditetapkan. Adapun Program tersebut antara lain adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Bahwa untuk mewujudkan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan indikator kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Aset Daerah dengan predikat WTP. Program kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut telah mewakili mekanisme dalam upaya pencapaian target sesuai tujuan dan sasaran. Program tersebut juga telah mewakili gambaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan capaian realisasi kinerja predikat WTP melalui penyajian laporan keuangan dan aset daerah yang maksimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian upaya memenuhi misi organisasi serta untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 394.712.892.031,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 14.455.857.831,00, Belanja Modal Rp 316.378.200,00, Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,00 dan Belanja Transfer Rp 377.940.656.000,00.

Adapun realisasi tingkat capaian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2024 dari pelaksanaan seluruh sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU 2024-P	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	394.712.892.031	392.020.927.424	2.691.964.607	99,32
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.444.514.631	8.859.843.371	584.671.260	93,81
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.254.400	95.921.933	332.467	99,65
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.847.000	26.847.000	0	100,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.256.300	15.256.300	0	100,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.785.600	15.785.600	0	100,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11.235.500	11.235.500	0	100,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11.859.000	11.859.000	0	100,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.271.000	14.938.533	332.467	97,82
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.987.337.656	5.707.719.753	279.617.903	95,33
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.812.656	4.605.110.330	206.702.353	95,70
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.097.009.600	1.025.982.700	71.026.900	93,53
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.620.800	25.693.550	927.250	96,52
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.369.600	23.000.200	369.400	98,42
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	28.525.000	27.933.000	592.000	97,92
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	161.389.000	158.360.000	3.029.000	98,12
5.02.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	161.389.000	158.360.000	3.029.000	98,12
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.651.000	45.817.540	71.833.550	38,94
5.02.01.2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.785.000	22.305.550	479.450	97,90

5.02.01.2 .05.09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.250.000	22.211.900	38.100	99,83
5.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.616.000	1.300.000	71.316.000	1,79
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.373.338.935	1.323.868.991	49.469.944	96,40
5.02.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.870.835	49.866.000	4.835	99,99
5.02.01.2 .01.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.414.000	48.952.880	1.461.120	97,10
5.02.01.2 .01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	306.301.000	306.209.150	91.850	99,97
5.02.01.2 .01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.766.100	358.747.850	18.250	99,99
5.02.01.2 .01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	5.400.000	600.000	90,00
5.02.01.2 .01.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.995.000	88.385.755	20.609.245	81,09
5.02.01.2 .01.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.992.000	466.307.356	26.684.644	94,59
5.02.01. 2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.638.200	124.565.000	13.073.200	90,50
	Pengadaan Mebel	87.631.000	78.295.000	9.336.000	89,35
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.007.200	46.270.000	3.737.200	92,53
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.050.000	877.990.568	97.059.432	90,05
5.02.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	496.000	4.004.000	11,02
5.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.000.000	246.115.255	25.884.745	90,48
5.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.350.000	57.336.000	14.000	99,98
5.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.200.000	574.043.313	67.156.687	89,53
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.855.440	525.599.676	70.255.764	88,21
5.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.573.000	273.314.320	55.258.680	83,18
5.02.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.010.000	22.010.000	0	100,00
5.02.01.2 .09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.076.440	205.907.856	5.168.584	97,55
5.02.01.2 .09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.196.000	24.367.500	9.828.500	71,26

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	384.282.199.400	382.197.398.445	2.084.800.955	99,46
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.385.200.000	1.138.398.514	246.801.486	82,18
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	108.760.000	104.323.000	4.437.000	95,92
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	85.617.000	77.297.350	8.319.650	90,28
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	76.572.000	53.628.250	22.943.750	70,04
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	79.976.000	64.383.250	15.592.750	80,50
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	64.900.000	59.477.200	5.422.800	91,64
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	91.879.000	61.594.700	30.284.300	67,04
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	276.703.000	208.939.950	67.763.050	75,51
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	259.642.000	221.317.400	38.324.600	85,24
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	341.151.000	287.437.414	53.713.586	84,26
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	709.641.300	663.545.761	46.095.539	93,50
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40.485.000	40.201.140	283.860	99,30
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	52.130.600	46.538.435	5.592.165	89,27
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	14.374.000	8.840.900	5.533.100	61,51
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	43.365.900	37.157.180	6.208.720	85,68
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	45.579.000	45.173.160	405.840	99,11

5.02.02.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.356.900	63.108.450	7.248.450	89,70
5.02.02.2 .02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	37.420.000	34.550.000	2.870.000	92,33
5.02.02.2 .02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	37.853.900	26.591.300	11.262.600	70,25
5.02.02.2 .02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	289.800.000	289.305.394	494.606	99,83
5.02.02.2 .02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	78.276.000	72.079.802	6.196.198	92,08
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	915.797.100	870.667.763	45.129.337	95,07
5.02.02.2 .03.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	59.250.000	55.019.700	4.230.300	92,86
5.02.02.2 .03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	57.060.900	56.685.700	375.200	99,34
5.02.02.2 .03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	162.318.300	156.263.022	6.055.278	96,27
5.02.02.2 .03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	134.774.000	128.414.478	6.359.522	95,28
5.02.02.2 .03.05	Kordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	187.466.000	187.125.658	340.342	99,82

	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
5.02.02.2 .03.06	Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46.864.000	46.569.850	294.150	99,37
5.02.02.2 .03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	45.981.000	31.110.100	14.870.900	67,66
5.02.02.2 .03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33.465.000	33.426.450	38.550	99,88
5.02.02.2 .03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	52.349.900	51.297.900	1.052.000	97,99
5.02.02.2 .03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.979.000	48.520.994	458.006	99,06
5.02.02.2 .03.11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	21.710.000	21.652.000	58.000	99,73
5.02.02.2 .03.11	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	65.579.000	54.581.911	10.997.089	83,23
5.02.02. 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	381.191.561.000	379.465.375.533	1.726.185.467	99,55
5.02.02.2 .04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.830.000	2.769.000	61.000	97,84
5.02.02.2 .04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.200.645.000	1.200.000.000	645.000	99,95
5.02.02.2 .04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	372.821.942.200	372.801.487.250	19.454.750	99,99
5.02.02.2 .04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000	294.175.283	1.705.824.717	14,71
5.02.02.2 .04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.166.144.000	5.166.144.000	0	100,00
5.02.02. 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	80.000.000	59.410.874	20.589.126	74,26
5.02.02.2 .05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	80.000.000	59.410.874	20.589.126	74,26

	Pemerintah Kabupaten/Kota				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	986.178.000	963.685.608	22.492.392	97,72
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	986.178.000	963.685.608	22.492.392	97,72
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	116.775.500	114.370.200	2.405.300	97,94
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.000.000	9.102.050	1.897.950	82,75
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	32.207.000	31.866.400	340.600	98,94
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33.139.000	32.214.900	924.100	97,21
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	44.705.500	44.068.862	636.638	98,58
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	30.200.000	29.193.500	1.006.500	96,67
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	207.649.000	206.646.292	1.002.708	99,52
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	54.035.000	52.961.595	1.073.405	98,01
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.074.000	35.056.315	647.685	98,19
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	35.362.500	34.017.270	1.345.230	96,20
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42.757.000	42.580.800	176.200	99,59
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76.260.500	75.673.070	587.430	99,23
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	266.383.000	255.934.354	10.448.646	96,08

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kab. OKU Timur dan DPA BPKAD Kab. OKU Timur

Berdasarkan realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dari tabel diatas diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2024 semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penyerapan pelaksanaan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada awal pelaksanaan Tahun 2021-2026 telah terealisasi dengan baik sebesar 99,32% sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Namun mengingat beban kerja yang cukup tinggi dan kurangnya sumber daya manusia maka kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun-tahun berikutnya perlu dioptimalisasikan lagi.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, salah satunya dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan merujuk kepada hasil yang akan dicapai. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus menerus. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana, serta dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur dapat tercapai optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja indikator pada pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 dapat dikatakan telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian realisasi indikator keluaran dari tiga program yang dilaksanakan dengan prosentase realisasi rata-rata senilai 99,32% pada tabel realisasi kinerja. Selanjutnya hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan dinilai cukup efisiensi dengan penggunaan anggaran sebesar 98,58% untuk pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi kegiatan. Penggunaan sumber daya dari segi aspek keuangan dapat dikatakan baik karena pemanfaatan sumber daya tersebut tidak defisit untuk tahun berjalan.

Pencapaian hasil evaluasi kinerja terhadap capaian realisasi indikator kegiatan maupun efektifitas realisasi anggaran tidak lepas dari aspek pendukung berupa penggunaan sumber daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik dari segi sumber dana maupun sarana dan prasarana yang terangkum dalam aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Adanya kompetensi dan kapabilitas dari pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta semangat untuk terus maju dan memberikan pelayanan maksimal juga menjadi faktor pendukung lainnya dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi gambaran evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pada pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta terwujudnya realisasi capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Martapura, 14 Januari 2025

KEPALA BPKAD KAB. OKU TIMUR,



AGUSTIAN PAHRIMALE, S.H,M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19730815 199903 1 008